BANK SAMPAH PAYUNG LESTARI : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG

Rindi Utami Setyaningrum, Hartuti Purnaweni, Budi Puspo Priyadi

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Community empowerment through the Payung Lestari Waste Bank program in Pudakpayung Village, Banyumanik District, Semarang City is an effort to make waste management run optimally. The purpose of this study was to analyze the stages of community empowerment through the Payung Lestari Waste Bank program in Semarang City and to analyze the factors that influence community empowerment through the Payung Lestari Waste Bank program in Semarang City. The research method used was a qualitative descriptive method with data collection analysis methods, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The informants in this study were the Secretary of Pudakpayung Village, the Waste Bank Coordinator, the Head of the Waste Bank, and customers of the Payung Lestari Waste Bank using the purposive sampling method. Data collection techniques were by interview, observation, and documentation. The results of the research showed that the stages of community empowerment were carried out through three stages, namely Awareness, Capacity Building, and Empowerment. The awareness stage shows that there is public awareness arising from the socialization carried out by the Payung Lestari Waste Bank management, the community begins to be actively involved in joint discussions with the Payung Lestari Waste Bank management, as well as the provision of rewards that can inspire the performance and enthusiasm of the community to participate in the Payung Lestari Waste Bank activities. The capacity building stage includes waste recycling training given to the Payung Lestari Waste Bank management, but there has been no training for the community. The empowerment stage includes changes in the character of the community to care more about the environment and the emergence of good habits for most people in managing household waste even though there is no cooperation with CSR and the community has not maximized existing business opportunities. The factors that influence community empowerment through the Payung Lestari Waste Bank are the involvement of waste bank management, waste bank customers, and the surrounding community in the Payung Lestari Waste Bank program, resource support from the Regional Government, and the availability of facilities and infrastructure for the Payung Lestari Waste Bank. Suggestions that can be given are to conduct resocialization, training for the community, and training in marketing waste products.

Keywords*: Community Empowerment, Waste Bank Management, Waste Bank*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah menjadi isu penting, terutama di wilayah daerah-daerah di Indonesia seperti Kota Semarang. Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pengelolaan sampah secara tepat mengingat bahwa Kota Semarang berperan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, dan kegiatan pelayanan. Oleh sebab itu, banyak masyarakat dari luar Kota Semarang yang pindah ke Kota Semarang. Yulistia dkk (2015: 1) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk Kota Semarang dan fakta bahwa Semarang menjadi salah satu tujuan dari urbanisasi, mengakibatkan meningkatnya produksi sampah dari aktivitas masyarakatnya.

Kota Semarang menduduki peringkat pertama sebagai daerah penghasil sampah terbesar di Jawa Tengah tahun 2023.

Tabel 1 Timbulan Sampah Kota Semarang Tahun 2019-2023

Tahun	Timbulan Sampah (ton)
2019	456.873,35
2020	466.010,79
2021	430.749,75
2022	431.085,22
2023	431.534,65

Sumber: SIPSN, 2023

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa pada saat pandemi covid-19 tahun 2020 timbulan sampah Kota Semarang sangat tinggi. Hal ini akibat dari pola konsumsi masyarakat berubah sejak pandemi yang lebih menyukai hal-hal serba instan sehingga menyebabkan lonjakan sampah di Kota Semarang dan paling banyak berupa sampah plastik dalam bentuk wadah kemasan. Kegiatan pengelolaan sampah juga tidak dapat berjalan secara maksimal saat pandemi.

Produksi sampah di Kota Semarang kembali meningkat pasca pandemi akibat kembalinya aktivitas masyarakat, menurunnya kasus Covid-19, serta dilonggarkannya sejumlah aktivitas masyarakat di luar rumah. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat terjadi peningkatan timbulan sampah pada tahun 2021-2023.

Kota Semarang juga mengalami permasalahan pada TPA Jatibarang yang telah mengalami kelebihan kapasitas dan melampaui batas usia operasionalnya. Purnaweni (2017: 4) mengatakan bahwa kapasitas TPA Jatibarang sekitar 850 ton per hari dan hanya sekitar 150 ton sampah yang dapat diolah menjadi kompos dan sisanya hanya ditimbun. Sementara itu, rata-rata sampah yang dibuang di TPA Jatibarang sebanyak 1.110–1.150 ton setiap hari (DLH, 2022). Kemudian, batasan usia operasi TPA umumnya adalah 30 tahun, sedangkan usia TPA Jatibarang yang telah mencapai 31 tahun (Khumairoh, 2024: 10). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang sedang mengalami darurat sampah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan timbulan sampah yang terus meningkat adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah. Menurut Buku Putih Kota Semarang Kelola Sampah, pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat mengurangi timbulan sampah hingga 30%. Oleh karena itu, adanya bank sampah memerlukan perhatian lebih dalam pelaksanaannya.

Tabel 2 Pemenang Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah Tingkat Kota Semarang Tahun 2023

Pemenang	Nama Bank Sampah
Juara I	Bank Sampah Payung Lestari
Juara II	Bank Sampah Sari Asri 3
Juara III	Bank Sampah Sumber Urip
Harapan I	Bank Sampah Harmoni Resik Becik
Harapan II	Bank Sampah Berkah
Harapan III	Bank Sampah Asri Sari

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa Bank Sampah Payung Lestari memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik, sehingga memberikan gambaran bagaimana seharusnya bank sampah dijalankan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Bank Sampah Payung Lestari.

Bank Sampah Payung Lestari berada di Jl. Situk RW 04 Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Bank Sampah Payung Lestari diresmikan pada tahun 2017. Bank Sampah Payung Lestari memiliki misi, yaitu 1. Memberdayakan masyarakat agar gemar menabung sampah, 2. Menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat. Kegiatan Bank Sampah Payung Lestari, yaitu melakukan edukasi dan pembudayaan pengurangan sampah dari tingkat RT hingga RW.

Berdasarkan observasi pra-penelitian didapatkan informasi bahwa terdapat permasalahan yang ada di Bank Sampah Payung Lestari, yaitu terkait masyarakat yang aktif memilah dan menabung sampah. Berdasarkan data Bank Sampah Payung Lestari tahun 2023 masih terdapat 110 kepala keluarga di RW 04 Kelurahan Pudakpayung yang tidak memilah dan menabung sampah. Penyebab masyarakat tidak ikut memilah sampah karena kesibukan pekerjaan mereka dan lebih memilih membayar tukang kebersihan untuk mengangkut sampah mereka. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab penumpukan sampah di TPA Jatibarang.

Penanganan sampah akan semakin lama jika tidak dikelola langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya untuk meninjau kembali bagaimana kegiatan rutin yang dilakukan Bank Sampah Payung Lestari untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari program Bank Sampah Payung Lestari guna menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Administrasi Publik

Corson dan Harris (1967: i) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah pengambilan keputusan, perencanaan kegiatan yang harus dilakukan, perumusan tujuan dan sasaran, serta tindakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan. Menurut Pfiffner dan Presthus (1953: 3) administrasi publik adalah kerjasama individu dan kelompok untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Kemudian Felix A. Nigro (1970: 21) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah kolaborasi di lingkungan publik dengan lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Administrasi publik berperan penting menciptakan kebijakan publik untuk pelayanan masyarakat.

Berdasarkan uraian dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerja sama sekelompok orang atau lembaga pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Manajemen Publik

Manajemen publik adalah salah satu bidang ilmu administrasi publik, selain Kebijakan Publik, yang mengkaji proses menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjalankan prinsip manajemen terhadap pelayanan kepada publik. Hal ini sesuai dengan pendapat Overman (dalam Pasolong, 2007: 83) yang menyatakan bahwa manajemen publik merupakan studi indisipliner mengenai aspek organisasi umum yang menggabungkan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian) dengan sumber daya manusia, politik, keuangan, fisik, dan informasi.

Salah satu sumber daya yang harus dimiliki untuk mengelola suatu organisasi, khususnya pada penelitian ini adalah sumber daya manusia (masyarakat) sebagai penggerak atau pelaku utama yang akan menentukan arah keberjalanan kegiatan pengelolaan sampah di bank sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan faktor pendukung pemberdayaan serta meminimalisir faktor yang menghambat pemberdayaan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Sumaryadi (2005: 11) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya penyiapan masyarakat disertai penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu mewujudkan kemandirian, kesejahteraan, serta kemajuan dalam suasana keadilan berkelanjutan. Menurut Mardikanto & Soebiato (2017: 100), pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial, perubahan ekonomi, dan perubahan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama yang partisipatif sehingga terjadi perubahan perilaku pada semua *stakeholders* (individu, kelompok, dan lembaga) yang terlibat dalam proses pembangunan guna mewujudkan kehidupan yang semakin berdaya, kehidupan yang mandiri, dan sejahtera secara berkelanjutan.

Sumartiningsih (2004: 50) mengatakan pemberdayaan bertujuan agar masyarakat dapat menciptakan kekuatan dan kemampuan sehingga dapat mengenali kebutuhannya sendiri serta mampu mengatasi persoalan yang akan terjadi di masa depan.

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayan dikatakan sebagai proses atau dapat juga dikatakan sebagai tahapan. Tahapan pemberdayaan dilakukan untuk menilai dan menelaah pemberdayaan yang ada. Tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007: 2-7) ada tiga tahapan, yaitu:

1) Tahap Penyadaran

Pada tahap ini, kesadaran diberikan kepada target pemberdayaan dengan memberitahu mereka bahwa mereka berhak atas sesuatu. Prinsip dasarnya adalah membuat target menyadari bahwa mereka perlu diberdayakan dan bahwa prosesnya dimulai dari diri sendiri.

2) Tahap Pengkapasitasan

Tahap ini sering disebut sebagai pengembangan kapasitas atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan. Sebelum diberikan daya atau kekuasaan, individu yang dimaksud harus mampu terlebih dahulu. Proses pengembangan kapasitas ada tiga jenis, antara lain:

a. Peningkatan kapasitas manusia dalam arti memberdayakan individu dan kelompok melalui sosialisasi, lokakarya, seminar, dan pelatihan. Pengkapasitasan dalam arti pengembangan kapasitas individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.

b. Peningkatan kapasitas organisasi dilakukan dalam bentuk penataan kembali organisasi yang akan menerima daya atau kapasitas.

c. Peningkatan kapasitas sistem nilai dilakukan dengan membantu target dan menetapkan aturan dasar di antara mereka sendiri. Dalam lingkup organisasi, sistem nilai terhubung dengan Peraturan Koperasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sistem dan Prosedur, dan dokumen serupa. Pada tingkat yang lebih tinggi, sistem nilai juga mencakup etika, pemerintahan yang baik, dan budaya organisasi.

3) Tahap Pendayaan

Pada tahap ini, target diberi daya, kekuasaan, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas keterampilan yang telah dimiliki. Gagasan utama dari pemberdayaan adalah bahwa daya atau kekuasaan diberikan berdasarkan keterampilan penerimanya.

5. Faktor yang Memengaruhi Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan bank sampah dalam pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Mardikanto & Soebiato (2017: 188-195) menjelaskan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Sumber daya manusia

Setiap penyuluh harus benar-benar mengetahui karakteristik masing-masing warga masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok sosial. Beberapa karakteristik sumber daya manusia yang harus diperhatikan oleh setiap penyuluh, yaitu kepadatan penduduk, keberagaman penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, laju pertumbuhan, tingkat pendidikan, nilai sosial budaya, mata pencaharian, kebutuhan masyarakat, serta pengelolaan dan penyelesaian konflik.

2) Kelembagaan

Keadaan kelembagaan perlu diperhatikan oleh seorang penyuluh yang meliputi lembaga ekonomi dan lembaga sosial. Lembaga berperan sebagai pelaksana dalam program pemberdayaan sesuai tujuan yang ditetapkan.

3) Sarana dan prasarana

Untuk membantu pelaksanaan program pemberdayaan, semua penyuluh harus mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana.

4) Kebijakan

Adanya kebijakan pemerintah merupakan salah satu prasyarat dan faktor pendukung terlaksananya program pemberdayaan. Setiap penyuluh harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang semua aturan dan hasil musyawarah masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan. Fasilitator penyuluhan akan kesulitan membuat program pemberdayaan masyarakat jika mereka tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebijakan yang disepakati. Program pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan dapat kurang bermanfaat, berbeda, atau bertentangan dengan kebijakan dan kesepakatan yang ada.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Bank Sampah Payung Lestari yang terletak di RW 04, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan pada penelitian ini diantaranya Sekretaris Kelurahan Pudakpayung, Koordinator Bank Sampah Payung Lestari, Ketua Bank Sampah Payung Lestari, dan nasabah Bank Sampah Payung Lestari. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis dan interpretasi data menggunakan tiga langkah, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Payung Lestari

Terdapat tiga tahapan yang diamati dalam penelitian ini, yaitu tahapan penyadaran, tahapan pengkapasitasan, dan tahapan pendayaan. Adapun deskripsi hasil analisis penelitian adalah sebagai berikut:

1) Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari dapat dikatakan belum berjalan baik sepenuhnya. Sosialisasi, musyawarah, dan *reward* telah dilakukan oleh Bank Sampah Payung Lestari, namun masih ditemukan beberapa permasalahan.

Pertama, sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Sampah Payung Lestari dapat dikatakan sudah optimal berdasarkan hasil pra penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat RW 04 Kelurahan Pudakpayung sudah mengetahui keberadaan Bank Sampah Payung Lestari. Metode sosialisasi yang digunakan oleh Bank Sampah Payung Lestari, yaitu sosialisasi secara langsung oleh pengurus bank sampah kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan PKK RT dan Dawis yang dilaksanakan setiap bulan. Selain itu, sosialisasi juga pernah dilakukan oleh

mahasiswa KKN dari Universitas Diponegoro dan dari perguruan tinggi lainnya.

Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang ragu untuk bergabung di Bank Sampah Payung Lestari atau sekadar memilah sampah, para pengurus bank sampah telah berupaya berbagai cara untuk mengedukasi warga Kelurahan Pudakpayung, khususnya di RW 04, tentang pentingnya mengelola sampah rumah tangga dan lingkungan. Masyarakat yang enggan untuk bergabung dengan Bank Sampah Payung Lestari karena beberapa masyarakat langsung menjual sampah yang mereka kumpulkan kepada pengepul dengan keinginan bisa langsung mendapatkan uang tunai. Selain itu, masih ada masyarakat yang enggan memilah sampah dari rumah karena kesibukan atas pekerjaan mereka dan mereka memilih membayar tukang kebersihan untuk mengambil sampahnya. Sampah yang tidak dipilah langsung dari rumah tangga seperti ini tentu akan menyebabkan *overload* pada TPA Jatibarang karena menampung langsung sampah-sampah rumah tangga dan memerlukan waktu lama untuk melakukan pemilahan sehingga akan terjadi penimbunan sampah.

Kedua, musyawarah bersama dengan masyarakat telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan, yakni dilakukan secara bertahap. Musyawarah yang dilakukan secara *bottom up*. Farihanto (2013: 183) mendefinisikan komunikasi *bottom-up* sebagai komunikasi yang terjadi dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi atau sebagai pesan yang mengalir dari bawahan ke atasan. Masyarakat menyampaikan pendapat mereka kepada pengurus unit pada saat kegiatan penimbangan, kemudian pengurus unit akan menyampaikan pendapat tersebut dalam rapat rutin pengurus bank sampah bersama dengan koordinator bank sampah. Pendapat atau masukan dari masyarakat sangat penting karena masyarakat merupakan pelaku utama dalam pemberdayaan melalui program Bank Sampah Payung Lestari sehingga dapat dikatakan prosedur yang digunakan sudah tepat. Penyampaian aspirasi secara *bottom up* ini akan mendorong terwujudnya *bottom up planning*. Mulyawan (2016: 60) mengemukakan bahwa *bottom up planning* merupakan salah satu indikator pemberdayaan masyarakat.

Musyawarah bersama masyarakat Bank Sampah Payung Lestari masih terdapat kekurangan, yaitu kurangnya keaktifan masyarakat yang terlibat dalam musyawarah. Pengurus bank sampah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpendapat, namun masyarakat belum sepenuhnya menggunakan kesempatan tersebut hanya dua sampai tiga orang yang aktif berpendapat. Mengutip pendapat Mulyawan (2016: 60) bahwa salah satu tanda tercapainya pemberdayaan masyarakat adalah adanya kemampuan masyarakat dalam mengemukakan pikiran dan tujuannya secara bebas. Hal ini dapat mendorong terlaksananya *bottom up planning*, yaitu perencanaan yang dibentuk berdasarkan kemauan masyarakat.

Ketiga, *reward* dan *punishment* yang diberikan oleh pengurus bank sampah kepada masyarakat atau nasabah bank sampah. Bank Sampah Payung Lestari mempunyai *reward* untuk nasabah maupun pengurus bank sampah sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih atas keaktifan mengikuti kegiatan di Bank Sampah Payung Lestari. Menurut Mulyawan (2016: 69) pemberian penghargaan atau insentif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam

bekerja sehingga dapat berkembang secara maksimal. Nasabah Bank Sampah Payung Lestari diberikan *reward* berupa barang atau bingkisan seperti sabun dan sembako yang diberikan setiap ada kegiatan jalan sehat atau bakti sosial yang diselenggarakan oleh pengurus bank sampah. Kemudian, *reward* untuk pengurus Bank Sampah Payung Lestari berupa tambahan uang tabungan sebesar dua ribu rupiah bagi pengurus bank sampah yang hadir setiap penimbangan sampah dan ada subsidi untuk pembuatan seragam pengurus. *Reward* yang diberikan kepada nasabah dan pengurus bank sampah merupakan laba dari penjualan sampah yang dikumpulkan. Adanya *reward* atau penghargaan dari Bank Sampah Payung Lestari dapat mengaspirasi kinerja dan semangat nasabah maupun pengurus bank sampah.

Punishment merupakan hukuman yang diberikan untuk menegakkan peraturan yang berlaku, meningkatkan kinerja, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar agar mereka menjadi lebih disiplin. Septiani (2019: 40) mengatakan bahwa hukuman atau sanksi dapat digunakan sebagai upaya untuk melemahkan perilaku dan cenderung menurunkan frekuensi perilaku berikutnya, biasanya berupa permintaan untuk konsekuensi yang tidak terduga. Hukuman yang diberikan kepada masyarakat yang tidak disiplin berupaya untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab telah bersama-sama komitmen untuk bergabung dalam Bank Sampah Payung Lestari belum ada. Bank Sampah Payung Lestari selalu mendasarkan pada hal kekeluargaan sehingga diyakini jika sistem tersebut diterapkan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak adanya sistem hukuman dalam program Bank Sampah Payung Lestari karena Bank Sampah Payung Lestari menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang ada.

2) Tahap Pengkapasitasan

Tahapan pengembangan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari dapat dikatakan belum berjalan baik. Pertama, pengembangan kapasitas masyarakat melalui kegiatan Bank Sampah Payung Lestari. Pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik, baik yang diberikan pengurus bank sampah atau *trainer* yang ahli dibidangnya. Fetterman dan Wandersman (dalam Mulyawan, 2016: 170) mengatakan pelatihan merupakan salah satu bentuk pengembangan kapasitas dan setiap program pemberdayaan harus mampu meningkatkan kapabilitas masyarakat. Namun, pada kenyataannya tidak ada pelatihan yang diberikan untuk masyarakat. Selama ini masyarakat hanya menabung sampah yang sudah dipilah ke Bank Sampah Payung Lestari.

Pelatihan kepada masyarakat belum dilakukan karena terkendala tenaga dan biaya, diketahui bahwa Bank Sampah Payung Lestari tidak bekerjasama dengan CSR. Pelatihan pengelolaan sampah selama ini hanya diberikan kepada pengurus bank sampah guna menunjang bank sampah mengikuti perlombaan-perlombaan. Ilmu yang dimiliki pengurus bank sampah belum ditularkan atau disalurkan kepada masyarakat luas.

Kedua, pengembangan kapasitas pengurus Bank Sampah Payung Lestari. Pengembangan kapasitas pengurus bank sampah perlu dilakukan sebelum mengembangkan kapasitas masyarakat. Hal ini karena pengurus bank sampah merupakan sebagai penggerak masyarakat. Kegiatan pengembangan kapasitas pengurus Bank

Sampah Payung Lestari telah berjalan dengan baik. Pelatihan-pelatihan sudah pernah diberikan dari beberapa pihak, seperti pelatihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, pelatihan dari CSR, pelatihan dari mahasiswa KKN, hingga pelatihan secara mandiri oleh pengurus bank sampah dengan memanfaatkan sosial media *YouTube*.

Pengurus Bank Sampah Payung Lestari juga pernah mendapat pelatihan *eco enzym* dan komposter dari salah satu warga RW 04 Kelurahan Pudakpayung yang merupakan pakar atau ahli di bidangnya. Pelatihan ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat RW 04 Kelurahan Pudakpayung.

Beberapa pelatihan pengelolaan sampah yang sudah dilakukan, seperti pelatihan membuat produk sabun, *eco enzym*, lilin, *ecobrick*, dan barang kreasi sampah plastik. Pengurus Bank Sampah Payung Lestari juga pernah mendapat pelatihan manajemen organisasi dan pelatihan menyusun pembukuan dari CSR, yakni Unilever Yogyakarta yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Pelatihan yang diberikan kepada pengurus bank sampah dinilai baru mampu mengatasi sebagian permasalahan yang dialami oleh pengurus bank sampah. Sebagai contoh pelatihan *eco enzym* dan komposter untuk mengurangi sampah organik, belum semua pengurus bank sampah yang menerapkan pengelolaan tersebut. Pengelolaan sampah organik menjadi *eco enzym* dan komposter ini juga belum disalurkan kepada masyarakat sehingga sebagian masyarakat hanya memanfaatkan sampah organik sebagai pakan ternak mereka. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa ada beberapa masyarakat yang beternak, seperti ayam, bebek, dan lain sebagainya sehingga masyarakat memanfaatkan sampah organik mereka sebagai pakan ternak-ternak mereka.

3) Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari ini belum berjalan dengan baik. Pertama, terdapat peluang usaha yang diberikan kepada masyarakat setelah mengikuti kegiatan bank sampah, hingga saat ini belum ada warga masyarakat yang mampu mandiri menjadi wirausahawan dengan uang hasil penjualan olahan sampah. Bank Sampah Payung Lestari masih menjual barang-barang olahan sampah secara kolektif dan produksi barang-barang olahan sampah tersebut kerap dilakukan saat ada kunjungan ke bank sampah saja. Kurangnya minat masyarakat umum terhadap produk-produk yang terbuat dari sampah daur ulang menjadi penyebabnya. Selain itu, belum maksimalnya tahap pengkapasitasan juga menyebabkan hal ini terjadi. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat belum memiliki daya secara penuh dari segi ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari karena keuntungan secara finansial yang didapatkan tidak terlalu besar.

Permasalahan ini dapat diatasi dengan memberikan pelatihan pengelolaan sampah kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memanfaatkan sampah menjadi produk olahan sampah yang berguna dan diminati oleh masyarakat luas. Selain itu, memberikan pelatihan tentang cara menarik pelanggan dan promosi produk, terutama untuk barang olahan limbah.

Pelatihan dapat dilakukan dengan melibatkan narasumber dari pengusaha sukses yang telah menghasilkan cukup pendapatan dari penjualan barang olahan limbah. Wirausahawan yang didatangkan dapat berasal dari wirausaha yang sama-sama menekuni di bidang bank sampah sehingga masyarakat dapat merasa sepaham dan senasib dalam proses yang dilalui. Hal ini dapat memotivasi masyarakat untuk lebih semangat meningkatkan kemampuan memproduksi barang dari olahan sampah karena dapat merasakan manfaat finansialnya.

Kedua, fasilitas yang diberikan CSR seharusnya mampu mendukung Bank Sampah Payung Lestari dalam memberdayakan masyarakat. Kartasasmita (dalam Mulyawan, 2016: 62) menyebutkan bahwa salah satu hal utama yang dibutuhkan dalam tahap pemberdayaan adalah penguatan terhadap daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan masukan berupa pembangunan infrastruktur, pengembangan lembaga pendanaan, pemberian bantuan permodalan, penelitian, pemasaran, serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang ada agar masyarakat semakin berdaya.

Bank Sampah Payung Lestari saat ini tidak ada kerjasama dengan CSR. Awal diresmikannya Bank Sampah Payung Lestari tahun 2017 sempat bekerjasama dengan PT Unilever Yogyakarta, namun kerjasama tersebut berakhir pada tahun 2019 karena PT Unilever Yogyakarta sudah tidak bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. PT Unilever sebelumnya pernah memberikan bantuan berupa pelatihan, buku tabungan, uang tunai, timbangan gantung, kalkulator, papan nama bank sampah dan tiang, serta papan struktur organisasi Bank Sampah Payung Lestari.

Peran CSR dalam memfasilitasi Bank Sampah Payung Lestari tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya menunjang kegiatan di bank sampah. Bank Sampah Payung Lestari sebenarnya masih membutuhkan gedung atau gudang untuk menyimpan sampah-sampah yang dikumpulkan masyarakat atau sekedar membutuhkan kanopi untuk di depan kantor sekretariat Bank Sampah Payung Lestari sehingga setiap ada kegiatan atau kunjungan tidak perlu menyewa kanopi.

Ketiga, telah terjadi perubahan karakter pada masyarakat RW 04 Kelurahan Pudakpayung meskipun dari segi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya berdaya. Mayoritas masyarakat telah mengembangkan kebiasaan positif dengan mengumpulkan sampah, membuang sampah pada tempatnya, dan menerapkan 3R, yang menunjukkan perubahan karakter ini. Hal ini memberikan dampak positif bagi lingkungan Kelurahan Pudakpayung, di mana saat ini kondisi lingkungan sudah jauh lebih bersih dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum adanya Bank Sampah Payung Lestari.

Perubahan lingkungan Kelurahan Pudakpayung dan perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli tidak lepas dari upaya pengurus Bank Sampah Payung Lestari, yaitu melaksanakan sosialisasi dan memotivasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Pengembangan karakter masyarakat mengantarkan pada terciptanya lingkungan Kelurahan Pudakpayung yang sehat. Hal ini merupakan perwujudan tujuan pembangunan sosial. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:72) menyatakan bahwa pembangunan

sosial tidak dilepaskan dari paradigma pembangunan sosial yang tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang sehat, panjang umur, serta kreatif.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Payung Lestari

Faktor yang menjadi pendorong pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari adalah keadaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada program pemberdayaan melalui bank sampah, yaitu masyarakat yang menjadi pelaku utama dan penerima manfaat pemberdayaan, baik sebagai nasabah bank sampah, pengurus bank sampah, maupun masyarakat sekitar. Keterlibatan nasabah bank sampah, pengurus bank sampah, dan masyarakat sekitar diketahui mampu mendorong program pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Payung Lestari.

Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Payung Lestari didukung dengan adanya antusias pengurus bank sampah dalam mengikuti pelatihan-pelatihan pengelolaan sampah. Pengurus bank sampah juga berinovasi dengan berlatih mengelola sampah secara mandiri melalui tutorial-tutorial dari media sosial. Nasabah bank sampah diketahui telah aktif mengikuti kegiatan Bank Sampah Payung Lestari. Masyarakat sekitar juga selalu mendukung kegiatan bank sampah dan tidak ada penolakan sehingga kegiatan-kegiatan Bank Sampah Payung Lestari hingga saat ini masih terus berjalan. Meskipun ada beberapa masyarakat yang tidak ikut menabung sampah, tetapi masyarakat selalu mendukung kegiatan-kegiatan di bank sampah dan tidak ada penolakan. Menurut Anggraini (dalam Nisa, 2020: 43), dukungan masyarakat sangat penting bagi pelaksanaan program.

Pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari, yaitu keadaan kelembagaan, keadaaan sarana dan prasarana, serta kebijakan. Pertama, keadaan kelembagaan dalam program pemberdayaan melalui bank sampah dapat dinilai melalui peran serta pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan pemberdayaan tersebut. Peran Pemerintah Kelurahan Pudakpayung dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari dikatakan masih kurang. Pemerintah Kelurahan Pudakpayung memfasilitasi Bank Sampah Payung Lestari setiap ada perlombaan dan menjadikan Bank Sampah Payung Lestari sebagai salah satu titik lokasi wisata edukasi. Hal ini dilakukan dengan harapan Bank Sampah Payung Lestari dapat lebih mengembangkan potensi yang dimiliki, namun dalam memberikan pelatihan kepada pengurus bank sampah ataupun masyarakat terkait pengelolaan sampah masih kurang.

Kedua, sarana prasarana menjadi hal penting dalam mendukung terlaksananya suatu program. Anggraini (dalam Nisa, 2020: 43) menyatakan bahwa tersedianya sarana prasarana yang memadai diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, serta dapat meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan kegiatan dapat terlaksana secara optimal, lancar, dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Bank Sampah Payung Lestari belum sepenuhnya mampu menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena Bank Sampah Payung Lestari tidak memiliki prasarana

gedung atau gudang untuk menunjang kegiatan-kegiatan bank sampah, seperti kegiatan penimbangan yang masih dilakukan di rumah warga. Bank Sampah Payung Lestari telah mengajukan bantuan untuk pembangunan gedung sendiri, namun belum bisa terealisasikan karena tidak memiliki lahan baru atau tanah negara.

Ketiga, kebijakan merupakan sebuah regulasi yang dibuat oleh suatu lembaga guna mengatur jalannya sebuah program. Kebijakan yang dikeluarkan dapat menjadi sebuah pendorong atau justru penghambat apabila tidak sesuai dengan program yang dilaksanakan. Kebijakan pada program pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Payung Lestari dilihat berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan kebijakan anggaran yang diberikan pemerintah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Payung Lestari mendapat dukungan dari Pemerintah Kelurahan Pudakpayung dengan mengeluarkan SK Kelurahan Pudakpayung Nomor 600/15.2/2017 tentang Bank Sampah Payung Lestari. Kemudian, terdapat kebijakan anggaran dari Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung kegiatan-kegiatan di bank sampah, namun belum mampu memenuhi kebutuhan Bank Sampah Payung Lestari. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa terdapat kebijakan anggaran dari pemerintah yang belum mampu mendukung upaya pemberdayaan masyarakat Bank Sampah Payung Lestari.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Payung Lestari telah memberikan pemahaman masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, mau memilah sampah, dan memanfaatkan sampah walaupun belum mencapai tingkat keberdayaan dan kemandirian. Tahapan pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Payung Lestari telah sesuai berdasarkan literatur mengenai pemberdayaan masyarakat. Tahapan pemberdayaan dimulai dari tahap penyadaran, dilanjutkan tahap pengkapasitasan, dan diakhiri dengan tahap pendayaan akan tetapi masih terdapat beberapa masalah dalam setiap tahapan pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Payung Lestari memiliki faktor penghambat antara lain kurangnya dukungan sumber daya dari Pemerintah Daerah dalam memberikan pelatihan pengelolaan sampah dan Bank Sampah Payung Lestari tidak memiliki prasarana gedung atau gudang.

SARAN

1. Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat RW 04 Kelurahan Pudakpayung terkait kebijakan pengelolaan sampah dengan tujuan seluruh masyarakat turut berpartisipasi mengelola sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle*.
2. Melakukan pelatihan kepada masyarakat terkait daur ulang sampah menjadi barang yang berdaya guna dan berdaya jual.
3. Memberikan pelatihan berkaitan cara menarik konsumen dan memasarkan produk daur ulang sampah dengan mengundang narasumber dari pengusaha yang telah sukses dan memperoleh omzet yang cukup dari penjualan produk daur ulang sampah. Hal ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya dalam

menghasilkan barang dari sampah daur ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Al Khumairoh, A. N. F., Purnaweni, H., & Herawati, A. R. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1-19.

Chakrabarty, B., & Chand, P. (2012). *Public Administration in ad Globalizing World*. India: SAGE Publications India Pvt Ltd.

DLH Semarang targetkan 1.000 bank sampah terdaftar KLHK pada 2024. (2023). Dalam https://jateng.antaranews.com/berita/517926/dlh-semarang-targetkan-1000-bank-sampah-terdaftar-klhk-pada-2024. Diakses pada tanggal 19 Agustus pukul 07:30 WIB.

Farihanto, M. N. (2013). Komunikasi Organisasi dalam Penanaman Budaya Organisasi di Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 179-194.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan.* Bandung: UnpadPress.

Nisa, T. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Bank Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Srayan Makarya, Bobosan, Purwokerto Utara, Banyumas)* (Undergraduate thesis, IAIN Purwokerto).

Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Purnaweni, H. (2017, Februari 21). Bom Waktu Sampah. *Suara Merdeka*: 4.

Septiani, H. (2019). *Peran Mekanisme Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah) BTM Bimu Bandar Lampung* (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung).

Sumartiningsih, A. (2004). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal*. Yogyakarta: Aditya Media.

Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

Timbulan Sampah Kota Semarang. (2023). Dalam https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan. Diunduh pada tanggal 13 Agustus pukul 16.00 WIB.

Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Yulistia, G., Suryaningsih, M., & Rostyaningsih, D. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 174-185.